

Konsultasi DPRD Kabupaten / Kota ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tentang Penjelasan Materi Hasil Pemeriksaan



Konsultasi DPRD Kabupaten Tapanuli Utara



Konsultasi DPRD Kabupaten Deli Serdang



Konsultasi DPRD Kabupaten Karo



REDAKSI

Mikael PH Togatorop (mt),

Barani M Silalahi (bs), Hj. Sri Madonna (sm), Hj. Ony Mauli (oni), Parulian (uli), Monika (mon), Ermila Octhari (mil), Suhendri (henz), Totok (ttk), Ardhyan (ard), Arief R (arra)

ALAMAT REDAKSI : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Lt. IV, Jl. Imam Bonjol No.22 Medan
Telp. 061-4519039 ext. 321

DPRD merupakan salah satu penerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Hasil Pemeriksaan BPK RI selanjutnya digunakan sebagai bahan pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Melalui Kesepakatan Bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Sumatera Utara, pihak DPRD dimungkinkan mengadakan konsultasi dengan pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut dalam rangka mendapatkan penjelasan materi hasil pemeriksaan.

Sehubungan dengan itu, di bulan Juli 2010 pada waktu yang berbeda tercatat ada 3 (tiga) DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan konsultasi tentang materi hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut. Semua kegiatan konsultasi dilaksanakan di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut.

DPRD Kabupaten Tapanuli Utara mengadakan konsultasi pada 12 Juli 2010, selanjutnya DPRD Kabupaten Deli Serdang (26 Juli 2010) dan DPRD Kabupaten Karo (27 Juli

2010) hadir untuk berkonsultasi. Pada acara konsultasi tersebut, pihak DPRD mengirimkan Ketua Dewan, beberapa anggota dewan, dan sekretaris dewan, sedangkan pihak BPK RI menghadirkan Kepala Perwakilan Oodj Huziat didampingi para pejabat struktural serta perwakilan dari tim yang melakukan pemeriksaan di kabupaten yang bersangkutan.

Kesempatan berkonsultasi tersebut dimanfaatkan dengan maksimal oleh pihak DPRD yang terlihat sangat aktif dalam meminta penjelasan tentang materi hasil pemeriksaan. Acara menjadi mengalir dinamis karena pihak BPK RI juga mengimbangi keingintahuan DPRD dengan memberikan jawaban yang lugas namun masih membuka kesempatan berdiskusi.

Diharapkan kegiatan konsultasi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh DPRD Kota/Kabupaten lainnya sebagai forum diskusi sehingga mengefektifkan hubungan kerja antara BPK RI Perwakilan dengan DPRD, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. (Arra)



Tahun Kedua
Edisi Juli 2010

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



MAKNA SEBUAH KESEPAKATAN

DARI REDAKSI

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 23 E bahwa: Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan, Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara diserahkan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK-RI, pasal 7 (4) menyatakan bahwa Tata cara penyerahan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD, diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing Lembaga Perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

Tata cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan saat ini telah diatur dalam kesepakatan bersama antara Perwakilan BPK Prov Sumatera Utara dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara pada tanggal 23 Februari 2006.

Atas kesepakatan tersebut BPK RI memandang perlu adanya perubahan terutama terkait tempat penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang diserahkan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang selama ini belum dapat dilaksanakan, sehubungan dengan waktu maupun teknis penyelesaian laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota tidak sama, sehingga tidak memungkinkan BPK RI dapat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Utara dan hal-hal lain yang dianggap masih perlu disempurnakan.

Kesepakatan Bersama ini masih terus dibahas untuk memantapkan hubungan yang semakin harmonis dan saling mengisi dalam rangka menjalankan amanat yang diemban oleh lembaga BPK dan lembaga DPRD dari pemilik Negara ini yaitu Rakyat. Semoga. (mt)

Daftar Isi ...

Dari Redaksi.....	1
Rapat Pembahasan Draft KB.....	1
Pengambilan Sumpah PNS.....	2
Isra' Mi'raj.....	3
Welcome To BPK.....	3
Jalan-Jalan ke Istana Maimoon.....	6
Konsultasi DPRD.....	8

Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPKRI Perwakilan Provinsi Sumut) menyelenggarakan Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD pada 12 Juli 2010. Kegiatan yang diadakan di Balai Citra Tiara Hotel Convention Center tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut dengan Sekretaris DPRD se-Sumatera Utara sebelumnya pada 24 Juni.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut dibuka oleh Kepala



Perwakilan Provinsi Sumut Oodj Huziat. Materi dari pertemuan kali ini adalah pembahasan masukan yang disampaikan dari pihak DPRD se-Sumatera Utara tentang konten dari Draft Kesepakatan Ber-

sama. Hadir sebagai peserta rapat adalah Ketua dan Wakil ketua DPRD Kota / Kabupaten se-Sumatera Utara didampingi Sekretaris DPRD. Sedangkan dari pihak BPK RI hadir para pejabat struktural di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Pembicaraan rapat meliputi pembahasan masukan yang diterima BPK RI terhadap pasal-pasal yang tercantum di dalam Draft Kesepakatan Bersama. Bertindak sebagai moderator adalah Kasubag Hukum dan Humas Mikael(bersambung ke hal.2)

Pengambilan Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil



Selasa 27 Juli 2009 pukul 10.00 WIB diadakan acara pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 23 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (BPK RI Perwakilan Provsu) dan 1 CPNS yang berasal dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. CPNS yang diambil sumpah PNS tersebut adalah **Farizky Krisdiansyah, Tetuko Onny PH, Dadik Sulisty Uto-mo, Tri Susio Rohimmatun, Fajar Novi Riyanto, Ridwan, Muh. Sa'adus Sulton, Sugeng Tri Wibowo, Dewi**

Rahandiani, Fitria Mahasari, Irvan Hernawan, Libriko Yadareditiyo, Muhammad Aria Septian, Fitriany Rahayu, Ernaldi Fazrie, Febria Syabran, A.Wahid Ramadhan, Neneng Juhariah, Nazaret Stefanus, Yoga Satria Prima, Supriyatmini, Tengku Muhammad Rizkansyah, Dwi Puspita Anggraeny, dan Jumakhir.

Pengucapan sumpah dipandu oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut **Oodj Huziat** dengan diikuti oleh seluruh pegawai yang diambil sumpahnya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji PNS secara simbolis dilakukan oleh perwakilan peserta. Untuk peserta beragama Islam diwakili oleh Tri Susio dengan saksi **Ridwan Sani Matondang** dan **Suyono**. Sedangkan untuk peserta beragama Kristen Protestan diwakili oleh Yoga Satria dengan saksi **Barani Martua Silalahi** dan **Masniar Elysbeth**.

Acara yang dilaksanakan di ruang auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut tersebut juga dihadiri oleh para pejabat struktural, rohaniwan dari agama Islam, rohaniwan dari agama Kristen Protestan, serta karyawan dan karyawan-ti di lingkungan kerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. (Arra)



.....sambungan Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan



P.H. Togatorop, sedangkan narasumber dari BPK RI adalah **Kepala Perwakilan Provinsi Sumut Oodj Huziat, Kepala Sub Auditorat Sumut I Yusnadewi, Kepala Sub Auditorat II Habib Zainuri, dan Kepala Sekretariat Perwakilan Eri Nugroho.**

Rapat berlangsung dengan dinamis karena pihak DPRD terlibat aktif dalam pembahasan masing-masing pasal dalam

draft Kesepakatan Bersama. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari pihak DPRD bahwa Kesepakatan Bersama antara BPK RI dan DPRD merupakan salah satu hal penting dalam bidang kerjasama antara BPK RI dengan DPRD

Sehubungan dengan rangkaian kegiatan tersebut, dijadwalkan pada bulan-bulan berikutnya akan diadakan pembahasan Rapat Pembahasan Tahap II yang akan melibatkan pimpinan DPRD dengan BPK RI Pusat didampingi oleh Ditama Binbangkum BPK RI. Diharapkan semua jadwal dapat berjalan sesuai rencana sehingga penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh pimpinan

B P K RI dan pimpinan DPRD bisa dilaksanakan tepat waktu. (Arra)



POJOK ANAK-MEDAN BAHASA

Galon artinya SPBU atau pompa bensin

Garang artinya ganteng

Gibal artinya pukul atau hajar (Contoh, "Awas kau, jangan macam-macam sama aku. Kugibal nanti kau".)

Recok artinya berisik

Sumber : www.kamus-medan.blogspot.com



14 Juli 2010
Kepala Sub Auditorat Sumut II menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu

TENTANG BPK RI

Pada penerimaan pegawai BPK RI tahun 2010, tercatat dari seluruh Indonesia ada 100.083 pelamar dengan jumlah pelamar yang diterima sebanyak 442 orang atau 0,44% dari total jumlah pelamar.

Pelamar yang mendaftar di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tercatat sebanyak 6.906 pelamar dengan jumlah pelamar yang diterima sebanyak 19 orang atau 0,28 % dari total pelamar yang mendaftar di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sumber : Daftar Sub Bagian SDM
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut



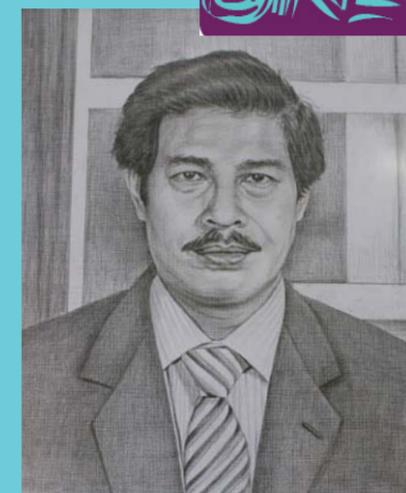
27 Juli 2010
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumut berfoto bersama para PNS yang baru mengikuti acara Pengambilan Sumpah PNS

FOTO TEMPOE DOELOE



1985
Para pejabat dari kantor pusat BPK RI meninjau pembangunan Komplek Rumah Dinas Pegawai BPK RI di Medan

SKETSAS



Drs. Roni Djoko Warsito
Kepala Perwakilan Wilayah IV di Medan
1985 - 1989